

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia, berada di antara Samudera Pasifik dan Hindia, dan merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara (Susmoro, 2019). Dari sudut pandang geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Luas wilayah perairannya mencapai 3,2 juta km², dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,9 juta km², yang mencakup sekitar 77% dari total luas wilayahnya. Karena itu, wilayah lautnya memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat serta pembangunan negara (Sulistyaningtyas et al., 2015). Bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, laut adalah sumber kekayaan terbesar sekaligus tantangan unik yang mereka hadapi (Handoko, 2020). Indonesia memiliki potensi maritim yang luas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi yang dimiliki mencakup aspek-aspek seperti bioteknologi, pariwisata kelautan, sumber daya perairan laut dalam dan mineral kelautan, industri pelayaran, upaya konservasi, serta kegiatan bisnis maritim di tingkat global. Selain dari segi sumber daya alamnya, posisi geografis Indonesia juga sangat strategis dalam konteks ekonomi dan politik (Syahrin, 2018).

Laut memiliki aspek penting bagi pembangunan ekonomi sebuah negara khususnya sebagai media utama perdagangan saat ini (Anugrah et al., 2019). Indonesia memiliki keunggulan dan kemandirian yang signifikan dalam bidang laut berkat posisi geostrategis dan geopolitik yang memungkinkannya menjadi jalur ekonomi dan keamanan laut internasional. Dengan memanfaatkan gagasan Poros Maritim Dunia, sangat logis jika ekonomi kelautan—juga dikenal sebagai "ekonomi maritim"—diletakkan di tengah-tengah pembangunan ekonomi nasional (Syahrin, 2018). Konsep poros maritim dunia bertujuan mengubah Indonesia menjadi negara maritim

yang maju, berpengaruh, dan sejahtera. Ini akan diwujudkan dengan mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan, menjaga kepentingan dan keamanan di wilayah maritim, memaksimalkan seluruh potensi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, memanfaatkan jalur laut untuk meratakan pembangunan ekonomi, serta melaksanakan diplomasi maritim dalam arena politik internasional (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Sampai saat ini, ada beberapa kendala yang menghalangi kemajuan industri maritim negara. Jika Indonesia ingin menjadi negara maritim, ia harus mampu memanfaatkan wilayah lautnya untuk membangun kekuatan militer dan pertahanan, bukan hanya sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan dalam industri pertahanan maritim Indonesia diharapkan akan mendorong perekonomian negara, yang pada gilirannya akan memungkinkan stabilitas keamanan negara. Kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa keamanan maritim. Begitu pula, kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa keamanan maritim. Mengelola keamanan maritim sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Paradigma maritim memandang ekonomi dan keamanan sebagai satu dan sama (Syahrin, 2018).

Kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perairan telah berhasil menciptakan pengaturan yang menguntungkan baik bagi Indonesia sendiri maupun negara-negara lain. Wilayah Indonesia bernilai sangat strategis dari perspektif geopolitik, bahwa tak bisa dipungkiri akan ada kepentingan-kepentingan dari negara lain dalam menggunakan jalur-jalur pelayaran yang ada (Rudiawan, 2021). Karena posisi Indonesia yang strategis, banyak kapal dagang dan angkatan laut dari berbagai negara melewati wilayah Indonesia (Hermawan & Sutanto, 2022). Lokasi Indonesia yang strategis karena perairannya bertindak sebagai penghubung antara benua Asia dan Australia serta sebagai pintu masuk antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan demikian, Indonesia menjadi pusat perdagangan global dan antar

negara selama era Pasifik. Oleh karena itu, perlindungan maritim harus dibangun secara proporsional dengan luas wilayah perairan di luar batas keinginan nasional. Kapal-kapal internasional yang melintasi wilayah perairan Indonesia harus dijamin keamanannya selama perjalanan (Rudiawan, 2021).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Presiden Jokowi telah menetapkan tujuh misi pembangunan nasional, di mana tiga di antaranya terfokus pada sektor maritim. Misi-misi tersebut meliputi: menciptakan keamanan nasional yang kokoh untuk menjaga kedaulatan wilayah, memastikan kemandirian ekonomi dengan mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan, serta memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini juga termasuk upaya untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim yang independen, maju, dan kuat, dengan fokus pada kepentingan nasional dan menjalankan politik internasional secara mandiri (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Misi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional memandang lautan Indonesia sebagai aspek penting yang berperan dalam menyatukan wilayah, mendukung transportasi dan komunikasi, sumber pertumbuhan ekonomi, dan sebagai unsur pertahanan untuk menunjukkan kekuatan. Oleh karena itu, isu keamanan maritim menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan laut yang aman dari berbagai ancaman, termasuk pelanggaran wilayah oleh pihak luar, bahaya navigasi, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, pencemaran lingkungan, serta pelanggaran hukum lainnya (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai rute yang ditujukan untuk pelayaran kapal asing (A et al., 2018). Akibatnya, sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam atau di sekitar garis pangkal lurus yang dikenal

sebagai perairan kepulauan, Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan jalur lalu lintas laut yang aman bagi kapal-kapal yang ingin bernavigasi atau bergerak melalui perairan Indonesia. Ini termasuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi kapal-kapal tersebut saat mereka berlayar atau melewati perairan tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menentukan dan menetapkan jalur lalu lintas bagi kapal-kapal pengguna laut dalam dan luar negeri di perairan yurisdiksi nasional sebagai ALKI beserta segala risiko yang diakibatkannya (Sulistyaningtyas et al., 2015).



Gambar 1.1 Alur Laut Kepulauan Indonesia

Sumber: <https://1001indonesia.net/alur-laut-kepulauan-indonesia/>

(Alur Laut Kepulauan Indonesia, 2016)

Bagi negara-negara lain yang akan menuju atau melewati NKRI, khususnya melalui laut, terdapat lima *choke point* yang merupakan titik penting dalam wilayah perairan dan banyak negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut (Rustam, 2021). *Choke point* juga bisa disebut kawasan laut yang secara geografis jalur sempit, tempat bertemu alur-alur pelayaran baik niaga maupun militer. 5 *Choke Point* Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Ombai Wetar, dan

Selat Lombok (Rudiawan, 2021). Pelabuhan, sebagai infrastruktur transportasi, merupakan titik kunci dalam menghubungkan berbagai daerah atau negara. Fungsinya sebagai tempat transit antar berbagai moda transportasi dan sebagai pusat distribusi produk menjadikannya sebagai penggerak utama dalam perekonomian. Selain itu, pelabuhan juga memegang peran strategis sebagai pusat komunikasi dengan nilai ekonomi tinggi dan merupakan pusat dari dinamika sosial budaya suatu negara (Nirmala, 2017).

Komitmen Presiden Joko Widodo terkait poros maritim dunia, memberi harapan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan (Rudiawan, 2021). Membangun wilayah maritim yang kuat bergantung pada pelabuhan. Pelabuhan juga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, berfungsi sebagai pusat transportasi antarmoda, dan memungkinkan interaksi sosial-ekonomi antar pulau dan negara. Dengan meningkatkan daya saing, efisiensi proses produksi dan distribusi, serta membangun integritas dan konektivitas dalam sistem perekonomian, kondisi pelabuhan yang baik memainkan peran krusial dalam pembangunan poros maritim yang kuat (Adam & Dwiastuti, 2015).

Sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional diangkut melalui laut, dan 40% dari rute perdagangan internasional melalui Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020). Ini terjadi karena transportasi laut dianggap sebagai mode transportasi yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan transportasi darat dan udara (Anugrah et al., 2019). Dalam bidang ekonomi, keberadaan kapal dan pelabuhan yang memadai sangat diperlukan, agar arus muatan dari kapal ke pelabuhan dapat terdistribusikan dengan baik (Handoko, 2020). Pemahaman tentang posisi geostrategis dan geoekonomi Indonesia merupakan dasar dari kebijakan poros maritim. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk bekerja sama dalam meningkatkan ekonomi, sambil langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Presiden Jokowi harus menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi Poros Maritim

Dunia, sekaligus negara bahari yang sejahtera dan berwibawa, mengingat pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia dari Barat ke Timur. Kawasan maritim akan menjadi aspek penting dalam ekonomi dunia dan sebagai penentu kekuatan bangsa di masa depan (Syahrin, 2018).

Menurut Syahrin (2018), doktrin poros maritim merupakan inisiatif untuk meningkatkan peran ekonomi maritim dan menciptakan sinergi dalam pembangunan kelautan nasional yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi. Implementasi dari doktrin ini adalah pembangunan tol laut. Menurut Handoko (2020), Tol laut adalah sistem konektivitas yang terbentuk dari rangkaian rute kapal yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan, memfasilitasi pergerakan orang dan barang baik dalam skala domestik maupun internasional. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi laut dengan cara memperbaiki jaringan pelayaran domestik dan internasional, mengurangi waktu tunggu yang menjadi penghambat efisiensi pelabuhan nasional, dan memperkuat peran transportasi laut (Syahrin, 2018).

Upaya tol laut ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mengelola kekuatan maritim agar dapat menciptakan keuntungan strategis dalam pembangunan kekuatan nasional. Kekuatan maritim merupakan unsur yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berprinsip *maritim superiority* dan kombinasi dari perdagangan maritim serta akses perdagangan luar negeri untuk memasarkan barang-barang nasional (Sulistyaningtyas et al., 2015). Menurut ajaran dari Sir Walter Raleigh (Sulistyaningtyas et al., 2015) berkata "Siapa pun yang mendominasi laut, akan mendominasi perdagangan, akan mendominasi kekayaan dunia, dan pada akhirnya akan mendominasi dunia itu sendiri."

Dalam pengelolaan perdagangan maritim, Indonesia memiliki total 636 pelabuhan, yang meliputi 18 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan nasional, dan 278 pelabuhan pengumpan lokal, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Namun, Indonesia memiliki 69 unit pelabuhan strategis yang dikelola oleh Perseroan Terbatas Pelabuhan Pelindo (PT Pelindo), salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok terletak dekat dengan Selat Sunda, yang merupakan salah satu titik sempit strategis (choke point) dan berfungsi sebagai jalur alternatif menuju Samudera Hindia. Apabila suatu saat Selat Malaka sebagai jalur distribusi utama mengalami permasalahan, rute alternative tersingkat bagi kapal lain untuk mencapai Samudera Hindia atau Samudera Pasifik adalah Selat Sunda (A et al., 2018).

Pelabuhan Tanjung Priok diakui sebagai salah satu objek vital berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2004 mengenai Objek Vital Transportasi, Pos, dan Telekomunikasi. Pasal 1 poin B dari keputusan tersebut menyatakan bahwa transportasi laut, termasuk pelabuhan laut yang memiliki hubungan internasional dan nasional, dianggap sebagai objek vital nasional (obvitnas). Pelabuhan Tanjung Priok memenuhi kriteria sebagai obvitnas karena adanya potensi ancaman atau gangguan terhadapnya dapat menimbulkan bencana bagi kemanusiaan dan pembangunan, mengganggu transportasi dan komunikasi nasional, serta menghambat operasi pemerintahan negara.

Tabel 1.1 Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo II

No	Nama	Pulau	Alamat
1	Teluk Bayur	Sumatera	Jl. Semarang No.3, Teluk Bayur, Sumatera Barat
2	Palembang	Sumatera	Jl. Belinyu No.1, Palembang, Sumatera Selatan
3	Panjang	Sumatera	Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung
4	Pontianak	Kalimantan	Jl. Pakasih No.11, Pontianak, Kalimantan Barat
5	Tanjung Priok	Jawa	Jl. Raya Pelabuhan No.8, Tanjung Priok, DKI Jakarta
6	Banten	Jawa	Jl. Raya Pelabuhan No.1, Ciwanden, Banten
7	Bengkulu	Sumatera	Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu
8	Cirebon	Jawa	Jl. Perniagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat

9	Jambi	Sumatera	Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi
10	Pangkal Balam	Bangka	Jl. Yos Sudarso No.1, Pangkal Pinang, Bangka Belitung
11	Sunda Kelapa	Jawa	Jl Maritim No.8, Sunda Kelapa, DKI Jakarta
12	Tanjung Pandan	Belitung	Jl. Pelabuhan No.1 Tanjung Pandan, Bangka Belitung

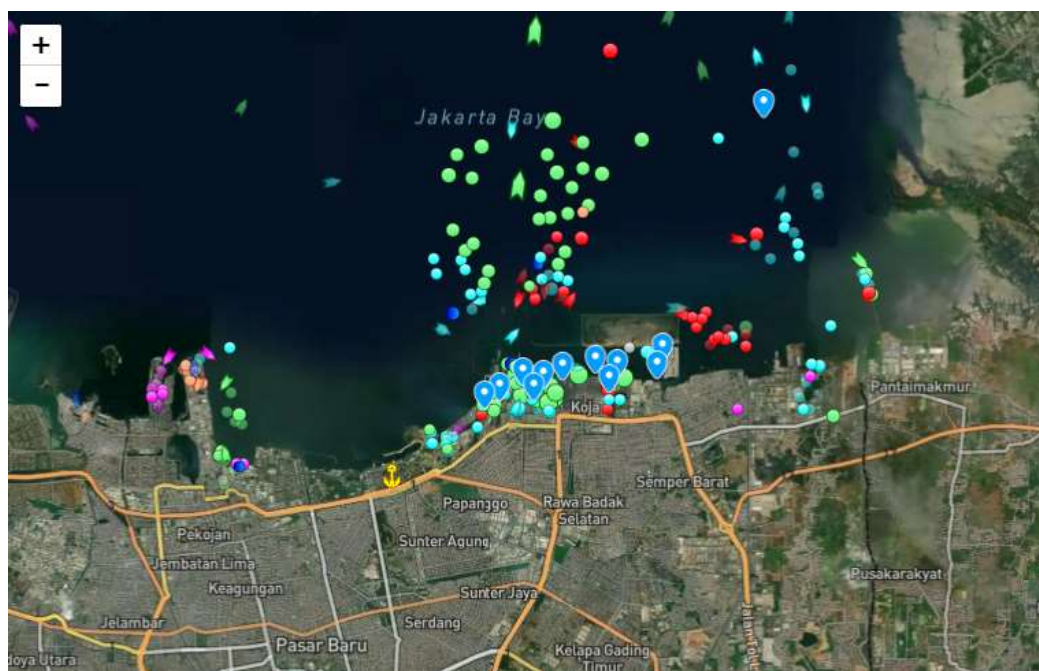
Sumber: (Pelindo, 2023)

Pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak di Jakarta Utara, adalah pelabuhan terpadat di Indonesia. Pelabuhan ini bertanggung jawab atas penanganan lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia, dan sekitar 50% dari total arus barang yang masuk atau keluar dari Indonesia melewati pelabuhan ini. Sebagai barometer perekonomian Indonesia, pelabuhan Tanjung Priok memerlukan pengelolaan dan pengamanan yang teratur dan berkala. Fasilitas intermoda yang lengkap di pelabuhan ini memungkinkan konektivitas dengan semua kota di Indonesia. Dengan teknologi dan fasilitas modern, Tanjung Priok dapat melayani kapal-kapal generasi baru yang langsung terhubung ke berbagai pusat perdagangan internasional (Pelindo, 2023).

Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di kawasan pesisir Jakarta merupakan perairan yang memiliki jalur perdagangan Internasional dari Samudera Hindia menuju perairan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Pantai bagian utara Jakarta sepanjang 32 km terdiri dari 13 (tiga belas) sungai, 2 (dua) kanal, dan 2 (dua) aliran air. Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan bisnis nasional sebagai ibu kota. Jakarta memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, baik hasil laut maupun sumber daya mineral, sebagai provinsi yang memiliki pantai dan lautan. Karena aktivitas kepelabuhanan, transportasi laut, dan kota pantai, ekonomi pesisir dan kelautan di wilayah pesisir sangat dinamis. Wilayah pesisir Jakarta memiliki nilai geopolitik dan geostrategis karena menjadi pusat perdagangan internasional untuk barang dan jasa yang masuk dan keluar dari Indonesia (DKI, 2021).

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki berbagai objek vital strategis dan fasilitas publik, sejalan dengan perannya sebagai pusat

gravitasi negara. Objek Vital Nasional (Obvitnas) didefinisikan sebagai kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan/atau usaha yang penting bagi kebutuhan masyarakat luas, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Contoh obvitnas meliputi bandara, pelabuhan, sistem pasokan air, serta penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Peran obvitnas sangat krusial dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Anugrah et al., 2019).

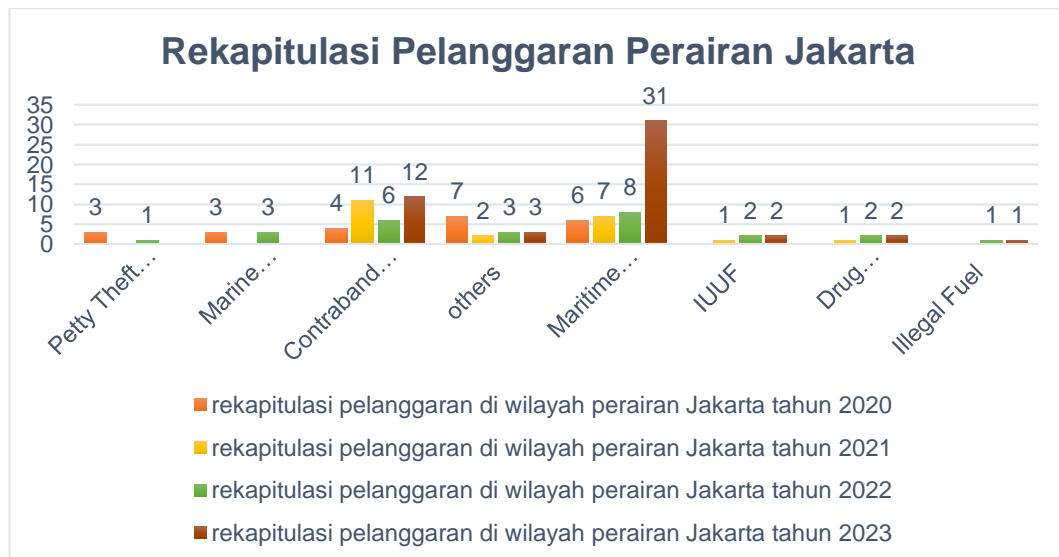


Gambar 1.2 Trafik Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta
Sumber: (*Marine Traffic*, 2023)

Pelabuhan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Fungsi pelabuhan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai titik pertemuan antarmoda transportasi, serta sebagai pintu gerbang yang memfasilitasi interaksi sosial-ekonomi antar pulau dan antar negara (Adam & Dwiastuti, 2015). Pemanfaatan kapal sebagai moda transportasi dalam pendistribusian produk ke beberapa wilayah seringkali tidak terlepas dari beberapa potensi ancaman, antara lain perompakan,

terorisme, pembajakan, dan ancaman keselamatan pelayaran. Dengan demikian ancaman dari buruknya pengelolaan jalur pelabuhan berada di sektor ekonomi maritim yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak (Anugrah, 2019).

Mengamati dan memahami perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat global, regional, dan nasional, obvitnas pelabuhan menjadi berpotensi sebagai target ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban nasional. Selain menjadi area perairan yang sibuk untuk pelayaran, wilayah perairan Jakarta juga menghadapi potensi tinggi akan tindak pidana, serta menjadi jalur utama bagi kapal kargo internasional. Risiko tersebut termasuk ancaman dari senjata, pencurian di laut, penyelundupan, aktivitas imigran ilegal, pelanggaran peraturan pelayaran, kontaminasi, serta risiko kecelakaan laut (Rohadi et al., 2017). Berikut adalah data yang dihimpun dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terkait dengan kasus pelanggaran hukum di perairan Jakarta.



Gambar 1.3 Rekapitulasi Pelanggaran di Wilayah Perairan Jakarta

Sumber: Bakamla RI, 2024

Keamanan pelabuhan merupakan komponen penting. Pelabuhan semakin penting untuk keberlangsungan pelayaran dan perdagangan internasional, sehingga masalah keamanan ini semakin penting. Mengingat

keamanan adalah aspek vital dalam operasional kepelabuhanan, penting untuk segera mengantisipasi ancaman terhadap keamanan dan aktivitas pelabuhan. Semua kegiatan di pelabuhan harus dijaga dalam kondisi keamanan yang optimal agar kinerja operasional pelabuhan bisa ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah, yang pada gilirannya akan membantu mewujudkan konektivitas antarmoda dan pemerataan pembangunan.

Kode Keamanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS Code) adalah peraturan keamanan yang mengatur keselamatan kapal maritim dan standar minimal untuk pembangunan, peralatan, dan pengoperasian kapal. Adanya kesepakatan tersebut disebabkan oleh serangan kapal tanker Limburg milik Perancis pada tahun 2002, yang dianggap sebagai serangan pelayaran oleh sekelompok teroris. Serangan tersebut meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya standar keamanan untuk fasilitas transportasi udara dan laut, terutama untuk pelabuhan yang melayani pelayaran internasional.

Pelabuhan yang aman adalah pelabuhan yang memenuhi standar keselamatan tinggi dan memiliki infrastruktur serta prosedur yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan insiden yang dapat membahayakan nyawa manusia, lingkungan dan harta benda. Hal ini mencakup penerapan standar keselamatan kerja yang ketat, sistem navigasi yang efektif, peralatan dan infrastruktur yang terawat baik, serta pelatihan yang memadai untuk personel pelabuhan. Pelabuhan yang aman juga memiliki rencana tanggap darurat yang siap digunakan dalam situasi darurat seperti tumpahan minyak atau kebakaran. Keselamatan kapal, penumpang dan kargo di pelabuhan juga menjadi prioritas utama dalam pelabuhan yang aman.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemerintah pusat dan daerah, serta semua lintas sektor bidang kemaritiman, harus sangat memperhatikan masalah kemaritiman karena memiliki dimensi internal dan

eksternal. Mengatur perairan laut teritorial dan aktivitas di dalamnya untuk kepentingan domestik merupakan bagian dari dimensi internal. Sedangkan pengelolaan wilayah laut negara dalam konteks kerja sama atau konflik dengan negara lain termasuk dalam dimensi eksternal. Luasnya perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksinya yang kaya sumber daya menyimpan potensi ancaman, serta menjadi sasaran ancaman faktual atau nyata melalui laut. Pelanggaran dan tindak pidana yang sering terjadi di antaranya termasuk kegiatan illegal fishing, pertambangan ilegal, penebangan liar, penyelundupan minyak, kejahatan lintas negara, perompakan, pembajakan, sabotase terhadap objek vital di laut, dan pencemaran (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Di Indonesia, keamanan laut diatur oleh beberapa instansi dengan berbagai kewenangan. TNI AL bertugas menjaga kedaulatan wilayah laut negara, termasuk melaksanakan fungsi pertahanan laut sesuai UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2014. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI bertanggung jawab atas pengawasan keamanan laut dan evakuasi dalam kecelakaan serta bencana alam, melakukan patroli kelautan hingga 200 mil laut, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan Perpres No. 178 Tahun 2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawasi pemanfaatan sumber daya laut, budidaya laut, penangkapan ikan, pengelolaan ruang laut, dan kesejahteraan nelayan, mencakup area hingga 200 mil laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengawasi barang impor dan ekspor serta memungut bea dan pajak sesuai aturan kepabeanan hingga jarak 24 mil laut. POLAIR, bagian dari Kepolisian, bertugas melatih dan melindungi masyarakat bahari serta melakukan patroli di perairan untuk mencegah kejahatan laut (Iswardhana et al., 2020). Berikut untuk lebih jelas terkait kewenangan dalam keamanan laut sebagai berikut



Gambar 1.4 Tata Kelola Pertahanan Laut
Sumber: Bakamla

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menetapkan TNI sebagai komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas ini diwujudkan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Beberapa kegiatan dalam OMSP meliputi mengatasi gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, terorisme, mengamankan objek vital nasional yang strategis, membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI Angkatan Laut, sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, memiliki tanggung jawab utama, yaitu 1) melaksanakan tugas di bidang pertahanan maritim, 2) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut nasional sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang

telah disahkan, serta 3) melakukan tugas diplomasi guna mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditentukan oleh pemerintah. TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam memastikan keamanan laut Indonesia.

TNI AL menggunakan doktrin sebagai fondasi strategis dalam pelaksanaannya untuk memastikan kondisi laut nasional yang aman dan terkontrol. Dalam mencapai tujuan ini, TNI AL memiliki empat peran utama: militer, penegakan hukum di laut, diplomasi, dan dukungan. Peran militer TNI AL mencakup penerapan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata di laut, guna menegakkan kedaulatan dan pertahanan negara, melalui tindakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Peran penegakan hukum di laut difokuskan pada perlindungan kepentingan nasional (Kusuma et al., 2021).

Angkatan laut di seluruh dunia, termasuk TNI AL, memiliki peran diplomasi yang sering disebut sebagai "kekuatan penampilan." Peran ini secara tradisional melibatkan mendukung kebijakan luar negeri dan mempengaruhi kondisi suatu negara, baik dalam masa damai maupun konflik. Selain peran diplomasi, TNI AL juga menjalankan peran dukungan, yang meliputi membantu tugas-tugas pemerintah atau misi kemanusiaan. Di samping peran-peran ini, TNI AL juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tiga tugas pertahanan negara (Kusuma et al., 2021). Dalam konteks pertahanan maritim, TNI AL memiliki struktur kekuatan yang dikenal sebagai Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sistem ini terdiri dari beberapa elemen seperti pangkalan, pasukan marinir, pesawat udara, kapal perang (KRI), dan kemampuan khusus lainnya yang saling mendukung. Keseluruhan elemen ini berkolaborasi untuk menciptakan kekuatan pertahanan laut yang solid dan efektif (Kusuma et al., 2021).

Perkembangan lingkungan strategis telah membawa perubahan yang sangat cepat di semua sector, baik sifat, bentuk serta dimensi ancaman. Dengan dikeluarkannya Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000, secara tegas telah dipisahkan antara pertahanan dan keamanan. Urusan pertahanan adalah menjadi ranah TNI, sedangkan keamanan ranah

Kepolisian RI. Potensi ancaman pada ranah keamanan bisa berubah menjadi ancaman pada ranah pertahanan, yang tentunya akan melibatkan pihak militer (TNI). Dapat dianggap sebagai ancaman potensial karena beberapa masalah yang sangat penting atau sensitif yang ditimbulkan oleh konflik antar negara karena aspek ekonomi dan politik. Ancaman ilegal di laut yang saat ini mengganggu keamanan maritim sering kali memiliki motivasi dan tujuan politik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kegiatan kriminal yang terpisah dan mandiri. Penggunaan laut untuk kegiatan kriminal telah meningkat seiring dengan pertumbuhan cepat perdagangan internasional, yang sebagian besar bergantung pada sektor maritim. Penyelundupan, terorisme laut, pembajakan, dan kapal perompakan bersenjata di atas. Sekarang kejahatan ini merupakan ancaman nyata bagi keamanan maritim (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Masyarakat maritim internasional telah dihantui oleh pembajakan di laut. Pembajakan di perairan Somalia dan sekitarnya adalah contohnya. Sulit untuk memahami jumlah uang yang begitu besar yang dibutuhkan untuk membebaskan para sandera dari pembajak jika melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, keamanan baik di tingkat nasional maupun regional menjadi sangat penting. Suatu keharusan untuk memastikan bahwa negara-negara di seluruh dunia memiliki stabilitas di bidang maritim, termasuk di kawasan regional ASEAN. Jika ini terjadi, program pembangunan negara-negara di satu wilayah dapat berjalan dengan lancar. Sifat-sifat ancaman tertentu dapat mempengaruhi stabilitas keamanan maritim nasional dan regional (Sulistyaningtyas et al., 2015). Pengamanan pelayaran melibatkan upaya untuk mencegah dan menindak kegiatan pelayaran yang dilakukan di luar jalur pelayaran yang telah ditetapkan, mengatasi penggunaan bendera negara yang melanggar peraturan penggunaan bendera kapal di laut, dan memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue - SAR).

Penegakan kedaulatan dan hukum Republik Indonesia di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional mutlak dilaksanakan

untuk menjamin stabilitas keamanan maritim nasional. Jika diabaikan, hal ini akan berimplikasi terhadap pembangunan nasional. Tindakan antisipatif perlu segera dilakukan bukan hanya sikap responsive saja, mengingat perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional cukup luas dan memiliki *choke point* strategis yang sangat banyak. Hal ini sangat rawan terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di dan dari laut. Suatu tindakan antisipatif dan sikap responsive bertujuan mengamankan segala kepentingan nasional di laut oleh kekuatan maritim Indonesia sehingga kedaulatan dan hukum RI dapat ditegakkan (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Stabilitas keamanan nasional merupakan kebutuhan pokok dan utama dalam mencapai cita-cita serta tujuan pembangunan nasional. dampak dari tidak optimalnya stabilitas keamanan nasional, khususnya keamanan maritim nasional, secara ekonomi makro akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari komunitas maritim nasional dan internasional untuk menggunakan jasa maritim Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada kontribusi devisa negara melalui laut sebagai salah satu kontribusi APBN tidak optimal. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional akan berdampak pada kondisi stabilitas keamanan maritim nasional. Di samping keamanan bidang lainnya, hal ini akan berdampak kepada stabilitas keamanan nasional. Agar Indonesia dapat berkembang tanpa hambatan, stabilitas dan keamanan kawasan harus dijaga (Sulistyaningtyas et al., 2015).

Sebagai bagian dari industri maritim dunia, Indonesia memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengamanan dan memberikan jaminan keselamatan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah perairan yurisdiksi nasional berdasarkan legalitas hukum laut internasional. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan negara-negara pengguna laut terhadap Indonesia. Bahkan, negara-negara tersebut akan mengirimkan kekuatan militer untuk melindungi kapal-kapal niaganya di wilayah Indonesia (Sulistyaningtyas et al., 2015). Pengaruh

lingkungan strategis regional terhadap peran hukum internasional memiliki kecenderungan yang cukup kuat terhadap negara-negara kawasan.

Dengan demikian, akan terjadi ketergantungan negara-negara kawasan terhadap Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Ketergantungan itu disebabkan masih sering terjadi tindak pidana dengan kekerasan senjata atau perompakan dan kecelakaan kapal atau musibah di laut wilayah yurisdiksi Indonesia. Keberadaan institusi militer (TNI), dalam hal ini TNI AL diharapkan tetap melaksanakan peran, tugas, dan fungsi sebagaimana lazimnya militer (navy) di seluruh dunia yang terkait dengan penegakkan kedaulatan dan hukum laut. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia hanya terdiri atas institusi militer, yang dalam hal ini TNI AL.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan melayani perdagangan internasional, memerlukan pengawasan TNI AL. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga keamanan maritim di jalur lalu lintas perdagangan internasional dan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jalur transportasi laut yang dilalui oleh kapal niaga yang membawa berbagai barang yang diimpor dan diekspor jauh melebihi harapan nasional. Artinya, TNI AL membangun jalur yang menghubungkan pelabuhan samudera nasional dengan pelabuhan samudera di seluruh dunia (Jayadi, 2017). Berdasarkan kebijakan dan keputusan politik pemerintah, TNI AL, sebagai bagian utama dalam pertahanan negara, memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman yang mencoba untuk masuk kedalam wilayah perairan dalam batas yurisdiksi nasional. Berikut adalah peta kerawanan Lantamal III Jakarta yang menjadi bagian yurisdiksi pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok.



Gambar 1.5 Peta Kerawanan Lantamal III Jakarta 2024

Sumber: Lantamal III Jakarta

Pengamanan objek vital seperti Pelabuhan Tanjung Priok oleh TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas negara. Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, memiliki keamanan yang sangat penting karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa pelabuhan Tanjung Priok berfungsi sebagai pintu utama untuk masuk dan keluar barang-barang impor dan ekspor Indonesia. Pelabuhan ini menyediakan layanan untuk sebagian besar perdagangan internasional negara ini. Gangguan atau ancaman terhadap keamanan pelabuhan dapat memiliki dampak serius terhadap ekonomi nasional. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial di sekitarnya. Jutaan penduduk Jakarta dan sekitarnya bergantung pada aktivitas pelabuhan ini untuk pekerjaan dan penghidupan mereka. Ketidakstabilan di pelabuhan

dapat memicu ketegangan sosial dan masalah keamanan. Pelabuhan Tanjung Priok juga memiliki potensi target untuk ancaman terorisme atau kejahatan terorganisir. Pengamanan yang kuat oleh TNI AL diperlukan untuk mencegah potensi ancaman ini (Romadhon, 2018).

Peran TNI AL dalam pengamanan objek vital seperti Pelabuhan Tanjung Priok melibatkan berbagai tugas, seperti patroli perairan, pengawasan terhadap lalu lintas kapal, pemeriksaan barang-barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan, serta kerja sama dengan lembaga keamanan dan penegakan hukum lainnya. TNI AL juga dapat melibatkan diri dalam pelatihan personel keamanan pelabuhan, pengembangan strategi keamanan, dan operasi keamanan khusus jika diperlukan. Pentingnya peran TNI AL dalam menjaga keamanan Pelabuhan Tanjung Priok adalah bagian integral dari upaya menjaga stabilitas negara, melindungi kepentingan nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertahanan negara adalah salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas negara. TNI AL sebagai institusi militer yang kuat untuk melindungi negara dari ancaman eksternal dan kebijakan pertahanan yang efektif untuk melawan berbagai ancaman, termasuk serangan teroris yang dapat mengancam stabilitas negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nixon R. Singal, Hasbullah, dan Nawawi Natsir pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Sistem Keamanan pada Objek Vital Tertentu di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah," hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan Polri dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kekurangan, terutama dalam hal koordinasi, terkait dengan keterlambatan petugas pengamanan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Tengah saat melakukan serah terima tugas (Singal & Natsir, 2021).

Dalam penelitian ini, pengamanan jalur lalu lintas perdagangan laut sangat diperlukan, agar menciptakan kepercayaan terhadap negara-negara yang melewati jalur perdagangan tersebut. Peran TNI AL disini adalah

sebagai subjek pengamanan jalur perdagangan laut tersebut. Dengan uraian diatas, untuk mewujudkan keamanan objek vital dengan optimal dalam mendukung stabilitas negara dan untuk mengetahui sejauh mana peran TNI AL dalam mengamankan objek vital pelabuhan, peneliti mengambil judul “Peran TNI AL Dalam Pengamanan Objek Vital Pelabuhan Tanjung Priok dalam Mendukung Stabilitas Negara”.

1.2 Fokus dan Subfokus

Penelitian ini berfokus pada aspek pengamanan objek vital di Pelabuhan Tanjung Priok. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 mengenai pengamanan objek vital nasional, disebutkan bahwa tugas pengamanan objek vital dilaksanakan oleh Kepolisian RI dan TNI yang membantu dalam pengamanan objek vital. Peran dan Dukungan TNI AL dalam Pengamanan Objek Vital Pelabuhan khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Sub Fokus penelitian ini peran dan strategi TNI AL dalam pengamanan objek vital pelabuhan Tanjung Priok.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang ada, rumusan masalah secara keseluruhan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Pengamanan Objek Vital oleh TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjaga stabilitas negara. Selanjutnya pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran TNI AL dalam menjaga keamanan Objek Vital Pelabuhan Tanjung Priok?
- b. Bagaimana strategi TNI AL dalam mengamankan Objek Vital Pelabuhan Tanjung Priok?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mempertibangkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan fokus masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis peran TNI AL dalam mengamankan Objek Vital Pelabuhan Tanjung Priok

- b. Menganalisis strategi TNI AL dalam mengamankan Objek Vital Pelabuhan Tanjung Priok

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kajian terkait pengamanan objek vital nasional di wilayah pesisir yang kaitannya dengan strategi pengamanan objek vital nasional untuk pertahanan negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan para *stakeholder* terkait antara lain:

- a. DPR RI Sebagai perumus kebijakan terkait dengan pengamanan objek vital pelabuhan strategis lainnya sebagai upaya mendukung stabilitas negara
- b. TNI dan Instansi Pengamanan Laut, menjadi acuan untuk pelaksanaan pengamanan objek vital yang berada di laut pada umumnya dan objek vital pelabuhan pada khususnya
- c. Universitas Pertahanan, Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut di masa depan, terutama dalam konteks pengamanan objek vital sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas negara.